

RURAL DIGITAL INCLUSION: BRIDGING SOLUTIONS TO MARGINALIZATION OF INFORMATION AND ADMINISTRATIVE SERVICES

DIGITAL INKLUSI PEDESAAN: MENJEMBATANI SOLUSI MARGINALISASI INFORMASI DAN LAYANAN ADMINISTRASI

¹Waliyuddin

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

E-mail: waliyuddin@iainpare.ac.id

Abstract

Rural digital inclusion is a concept that prioritizes the utilization of information technology transformation from analog to digital systems. It is an innovation that enhances inclusivity to achieve equality in quality of life as well as access to information and administrative services in rural areas. This study aims to examine the factors contributing to the gap, bridge development efforts, and identify the challenges faced in digital development by village governments through e-government in Lembang Bo'ne Buntu Sisong, Makale Selatan District, Tana Toraja Regency. The results show that the digital gap is caused by limited infrastructure, lack of access skills, and unavailability of budget. Digital inclusion initiated by the lembang government serves as a solution to anticipate conditions of information marginalization by developing a village/lembang website that can effectively and efficiently fulfill the community's right to information and public services. The challenges faced in developing digitalization in the lembang government or e-government include: (1) leadership challenges related to policy support and regulations for the implementation of e-government; (2) cultural challenges among villagers in accepting the transformation of information access and services from analog to digital, where available access has not been used participatively and awareness of its utilization is still low; and (3) governance challenges, as the transformation of information and administrative services in an e-government system requires competence support from village government officials. The findings of this study are expected to provide insights into implementing digital inclusion to minimize the emergence of marginalized groups due to the digital divide.

Keywords: *Digital Inclusion, Digital Divide, Information Marginalization*

Abstract

Inklusi Digital pedesaan merupakan konsep yang memprioritaskan pemanfaatan transformasi teknologi informasi dari analog beralih sistem digital. Sebuah inovasi meningkatkan inklusivitas untuk kesetaraan kualitas hidup serta pelayanan informasi dan administrasi di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor kesenjangan, menjembatani pengembangan, serta mengidentifikasi tantangan pengembangan digital oleh pemerintah desa melalui e-government di Lembang Bo'ne Buntu Sisong Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital oleh faktor keterbatasan infrastruktur, keterampilan akses, dan ketidaktersediaan anggaran. Digital inklusi oleh pemerintahan lembang menjadi sebuah solusi mengantisipasi kondisi marginalisasi informasi dengan membangun website desa/lembang yang secara efektif dan efisien dapat memenuhi hak masyarakat terhadap informasi dan layanan publik yang efektif dan efisien. Tantangan dihadapi dalam pengembangan digitalisasi pemerintah lembang atau e-government meliputi: meliputi (1) tantangan kepemimpinan yang menghadirkan dukungan kebijakan dan regulasi implementasi e-govenrment; (2) tantangan budaya warga desa dalam menerima transformasi akses informasi dan pelayanan dari analog ke digital, Dimana ketersediaan akses belum dimanfaatkan secara partisipatif dan memunculkan kesadaran pemanfaatannya; (3) tantangan tata Kelola dimana transformasi layanan informasi dan administrasi dalam sistem e-goverment meliputi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

membutuhkan dukungan kompetensi aparatur pemerintah desa. Manfaat penelitian diharapkan memberikan kajian penerapan implementasi digital inklusi untuk meminimalisir terjadinya kelompok marginal akibat kesenjangan digital.

Kata kunci: Digital Inklusi, Kesenjangan Digital, Marginalisasi Informasi

PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Kemajuan teknologi hakekatnya merupakan suatu pengetahuan manusia tentang cara menggunakan alat atau mesin untuk melaksanakan tugas pembelajaran secara efisien. (Fahyuni, 2017). Teknologi komunikasi idealnya menerapkan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi untuk memproduksi suatu item material bagi efektifitas dan efisisensi proses komunikasi. Teknologi komunikasi juga dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi melalui penciptaan material (alat-alat teknis) agar meningkatkan kualitas dan kuantitas peranan unsur-unsur komunikasi seperti sumber, pesan, media, sasaran, dampak sesuai dengan konteks komunikasi. (D. Setiawan, 2018). Keberhasilan dalam pengelolaan suatu lembaga bisa dilihat dari ketertiban pelaksanaan dari pengelolaan kegiatan pondok pesantren itu sendiri (Sutedi et al., 2021). Permasalahan Pondok Pesantren kesulitan dalam memberikan contoh penggunaan dari ilmu yang dipelajari khususnya bidang teknologi informasi (A. B. Setiawan & Sulaksono, 2019).

Menurut Ricard West dan Lynn H. Turner (2008), Lance Strate mendefinisikan Ekologi Media sebagai “Kajian mengenai lingkungan media, ide bahwa teknologi dan teknik, mode penyampaian informasi dan kode komunikasi memainkan peran utama dalam kehidupan manusia” (Evi Novianti, 2019) . Adapun penamaan Teori Medium diberikan karena secara khusus dalam teori ini dikenal istilah “medium adalah pesan” (*medium is the message*). Dalam perspektif teori ini, bukan pesan yang memengaruhi kesadaran kita tetapi medium. Mediumlah yang lebih besar mempengaruhi bawah sadar kita. Medium membentuk pesan, bukan sebaliknya. Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan (1964). Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh mentornya, ekonom berkebangsaan Canada, Harold Adams Innis (1951). McLuhan adalah ilmuwan sekaligus kritikus sastra berkebangsaan Canada. Ia menggunakan puisi, fiksi, politik, teater musikal dan sejarah untuk menunjukkan bahwa teknologi yang menggunakan media membentuk perasaan, pikiran, dan tindakan manusia. McLuhan menyatakan bahwa kita memiliki hubungan yang sifatnya simbiosis dengan teknologi yang menggunakan media.

Manusia menciptakan teknologi, dan sebaliknya teknologi membentuk kebiasaan manusia. Inilah yang menjadi konsep dasar dari teori ekologi media. Asumsi Teori Ekologi Media

1. Media melingkupi setiap proses berpikir, pengambilan Keputusan, dan tindakan di dalam masyarakat. Kita tidak dapat melarikan diri dari media. Bahkan McLuhan menyebut angka, permainan, dan uang sebagai mediasi. Meskipun media media mengalami transformasi dalam masyarakat, manusia pun turut beradaptasi terhadap determinisme teknologi, mulai dari media cetak, elektronik yang bersifat analog seperti radio yang didengarkan melalui frekuensi, atau TV yang ditonton, dan media



- baru dengan sistem digital. Pada saat bersamaan, media bergantung pada masyarakat untuk “pertukaran dan evolusi”.
2. Media memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman kita Kita dan secara langsung dipengaruhi oleh media. Media cukup kuat dalam membentuk pandangan kita tentang dunia. Kita tanpa sadar termanipulasi oleh apa yang disajikan media serta bagaimana media menyajikannya. Sikap dan pengalaman kita secara langsung dipengaruhi oleh apa yang kita tonton di televisi atau media sosial, dan sistem kepercayaan kita dapat dipengaruhi secara negatif maupun positif. Dapat pula berlangsung secara gradual ataupun secara spontan dalam akses informasi media, namun seiring dengan mutakhirnya teknologi, media semakin menunjukkan kecepatan dan ketepatan serta penyebaran informasi yang berlangsung secara akurat.

Media menyatukan seluruh dunia Media menghubungkan dunia. McLuhan menggunakan istilah desa global (*global village*) untuk mendeskripsikan bagaimana media mengikat dunia menjadi sebuah sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Manusia tidak lagi dapat hidup dalam isolasi, dan dapat melepaskan manusia dari marginalisasi informasi. Media memiliki kemampuan untuk menjembatani interaksi global antar budaya yang tidak akan pernah berkomunikasi sebelum adanya koneksi ini (Meisyaroh, 2014).

Perkembangan digital tidak serta merta menyajikan ruang kesetaraan yang egaliter dalam ekosistem komunikasi untuk dimanfaatkan bagi seluruh warga negara secara berkeadilan. Stigmatisasi marginalisasi kelompok Masyarakat tertentu non-pengguna internet yang membawa kita pada keadaan saat ini bahwa terdapat kelompok yang mengalami deprivasi akses terhadap media yang terkoneksi jaringan internet, dan kondisi ini semakin membawa kekhawatiran pada lahirnya bentuk marginalisasi dalam masyarakat modern saat ini. Eknologi digital juga diasumsikan menciptakan eksklusi sosial dalam Masyarakat melalui kesenjangan digital.

Menurut Hagittai, 2003 dalam Triguswinri & Afrizal, bahwa dampak eksklusi terjadi pada kelompok yang tidak mengetahui bagaimana menggunakan teknologi. Konsep kesenjangan digital cenderung dilihat sebagai kesenjangan antara yang memiliki akses terhadap teknologi (*the haves*) dan kelompok yang tidak memiliki akses (*thehave-nots*) (Triguswinri & Afrizal, 2021). Kategorisasi kesenjangan digital meski dilihat secara holistik dan multidimensi dari keadaan individu tau kelompok terhubung (*state of connection*) atau tidak dapat terhubung, serta tidak mampu terhubung karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran. Studi Ezster Hagittai bahwa kesenjangan digital dapat dijembatani dengan menyediakan akses gratis untuk publik. Dalam konteks ini, negara turut membantu mempromosikan penggunaan digital. Sehingga pada penelitian ini, berfokus pada upaya peningkatan akses masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai langkah inklusi digital agar tidak terdapat lagi kelompok Masyarakat yang terabaikan dan semakin mempersulit dalam akses informasi dan layanan publik yang rentan melahirkan bentuk marginalisasi informasi era post modern. Marginalisasi



memiliki arti yaitu kondisi keterbatasan akses (Suryani & Hermawan, 2021), dalam hal eksklusi digital terdapat kelompok yang rentan karena tidak memiliki akses.

Ketika penggunaan media digital semakin mendominasi dalam Masyarakat kita, justru wajah kesenjangan muncul dalam berbagai konteks yang disebut kesenjangan digital. Sebuah bentuk ketimpangan antara populasi yang memiliki akses terhadap teknologi dan informasi berbasis digital (Littlejohn & Karen A. Fos, 2009). Tentu kesenjangan tersebut akan menimbulkan permasalahan dan model marginalisasi baru sebab dampak kesenjangan digital khususnya pedesaan akan menimbulkan dan membatasi akses terhadap sumber informasi dan komunikasi baru sehingga secara signifikan akan menimbulkan ketimpangan sumber daya sosio-ekonomi, Pendidikan, informasi kesehatan (Vassilakopoulou & Hustad, 2023) dan informasi lainnya yang dapat digunakan oleh Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Marginalisasi informasi pedesaan di mana terbatasnya informasi dan akses ke ekosistem digital yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan marginalisasi informasi pedesaan dalam era digital meliputi: Ketidaksetaraan Infrastruktur seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, kurangnya akses Perangkat digital karena kemampuan finansial, kurangnya Keterampilan dalam menggunakan teknologi digital.

Van Dijk, 2012 mengemukakan Digital divide merupakan ketidaksetaraan antar individu dalam mengakses dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet (Castells, 2001). Konsep tersebut mengalami pergeseran karena perkembangannya, kesenjangan digital bukan hanya mengenai kesempatan dan kemampuan akses saja. Sekarang ini lebih meluas pada hal yang bersifat non materi tetapi perilaku pengguna media meliputi (1) *Motivation* yakni keinginan atau motivasi seseorang untuk terhubung menggunakan teknologi informasi; (2) *Physical and Material Access* Faktor ini terkait ketersediaan sumber daya yang merata. Sumber daya disini dapat meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu juga ada pendistribusian infrastruktur pada setiap wilayah seperti infrastruktur untuk kemudahan jaringan internet. 3) *Skills Access* yakni kemampuan atau keahlian seseorang untuk mengelola dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. 4) *Usage Access* yakni tujuan penggunaan untuk kemanfaatan teknologi. Adapun faktor pembentuk perbedaan tersebut diantaranya seperti usia, tingkat pendidikan, dan domisili (Setifani et al., 2022).

Kesenjangan digital rentan memunculkan populasi marjinal kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat karena perubahan kondisi interaksi, akses informasi dan layanan administrasi yang telah bertransformasi pada sistem digital. Salah satunya adalah populasi ini tinggal di lingkungan pedesaan dan terpencil akibat keterbatasan sumber daya. Daerah yang rentan pengucilan dan hambatan proses sosial yang berasimilasi teknologi digital (Vassilakopoulou & Hustad, 2023). Meskipun pada umumnya menyadari bahwa teknologi itu penting dan berguna untuk memfasilitasi keterlibatan sosial, namun sistem harus dikembangkan sedemikian rupa agar dapat mendorong terciptanya Masyarakat egaliter dengan pemanfaatan perkembangan teknologi.



Meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah melalui layanan digital memerlukan upaya agar menjangkau individu dan komunitas yang berada di pihak yang kurang beruntung. Pengembangan layanan informasi dan administrasi oleh pemerintahan desa merupakan satu langkah inovatif inklusivitas digital oleh pemerintah desa yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Misalnya pada pasal 68 ayat (a,b, c) tentang hak Masyarakat desa yakni “meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa” (Bender, 2016).

Munculnya sistem digital sebagai peluang dalam mengubah tatanan interaksi penyebaran informasi maupun pelayanan publik. Sebagai alternatif terhadap persoalan sosial kemanusiaan, ekonomi, politik, kesehatan, sains dan teknologi dapat dijalin menjadi sebuah network (jaringan) dan tidak bersifat sektoral. Setiap aspek kehidupan dapat saling berinteraksi, berkorelasi dan saling berpengaruh dalam jaring kehidupan yang disebut sebagai sebuah titik Omega. Muncul pula bentuk kesadaran baru terhadap signifikansi media yakni kesadaran semesta digital (Amarini, 2018) yang tidak dapat dihindari. Menurut Deegan, digitalisasi merupakan proses konversi berbagai informasi maupun berita dari format analog menjadi format digital agar lebih mudah untuk di akses oleh siapapun. Informasi digital biasanya disajikan dalam bentuk gambar, teks, audio, ataupun video. (Kharisma & Zulfiningrum, 2020).

Menurut Foucault (1979) dalam Diaz Andrade & Techatassanasoontorn (2021) bahwa penerapan konsep teknologi oleh pemerintahan dan dalam menjalankan kekuasaan bertujuan untuk menguraikan mekanisme yang menciptakan penegakan digital. Menciptakan bentuk interaksi percakapan dan tindakan antara pemerintah dan masyarakatnya secara lebih intelektual untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Secara khusus, penerapan teknologi dalam pemerintahan merupakan sebuah bentuk eksplorasi gagasan demokratisasi dengan pendekatan yang masuk akal karena pemanfaatan sistem digital dalam layanan pemerintah untuk memastikan bahwa melayani jangkauan kepentingan yang lebih luas kepentingan (Díaz Andrade & Techatassanasoontorn, 2021). Digital inklusi pedesaan sangat penting sebagai solusi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat di pedesaan untuk terlibat dalam ekosistem digital dan mengakses manfaat yang ditawarkan oleh teknologi informasi seperti: mendapatkan layanan dasar administrasi kependudukan secara efektif dan efisien; mendorong warga pedesaan untuk terlibat dalam ekonomi digital; akses informasi pendidikan dan Pengetahuan yang lebih baik pembelajaran online, sumber daya pendidikan digital, dan pelatihan keterampilan secara daring; peningkatan layanan kesehatan dan sosial dengan konsultasi medis dan edukasi kesehatan secara online. Akses informasi yang relevan dengan kebutuhan lokal seperti Informasi pertanian, cuaca, harga komoditas, dan berita lokal dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang



lebih baik; meningkatkan partisipasi dalam Pembangunan pedesaan, melalui pemberian saran dan aspirasi yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.

Masyarakat pedesaan dapat merasakan manfaat perkembangan teknologi dan inovasi melalui upaya untuk menciptakan inklusi digital kita dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga mencakup dan memperkuat seluruh komunitas, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Era Digital menempatkan Dunia berada pada Pergeseran memiliki implikasi yang sangat luas. Ditandai Percepatan arus data dan informasi mengubah dinamika globalisasi. Aliran data global terutama terdiri dari informasi, pencarian, komunikasi, transaksi, video, dan lalu lintas virtual. Digitisasi membuat arus global lebih inklusif. Hari ini pengrajin, pengusaha, pengembang, pekerja lepas, usaha kecil, dan bahkan individu dapat berpartisipasi langsung platform digital dengan jangkauan global (James Manyika, Susan Lund, Jacques Bughin, Jonathan Woetzel, Kalin Stamenov, 2016). Digitalisasi pada kenyataannya telah menyajikan inklusivitas dalam arus informasi global dan secara alami harus menghindari beberapa jebakan konseptual bagaimana menempatkan posisi media digital dalam isu demokrasi. Dimana warga negara harus dimasukkan dalam kerangka analitis pada perspektif kualitas publik sebagai bagian dari partisipasi dalam arus informasi global dan nasional. Warga tidak hanya sebagai audiens namun menciptakan permintaan tertentu, dengan proliferasi media, warga negara dapat mendapatkan hak informasi dan layanan yang lebih mudah, murah, cepat serta bermanfaat. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa Website desa dapat difungsikan sebagai media peningkatan pelayanan public kepada masyarakat desa secara online (Prayoga et al., 2020). Pemberdayaan desa melauai TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yaitu: (1) Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya membentuk PUSPINDES (Pusat Pemberdayaan Informatika Perdesaan), (2) membuat website desa, (3) Sidekem (Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pematang Jaya) (Khusna, 2019).

Tim penelitian melalui kemitraan dengan pemerintahan Lembang Bo'ne Buntu Sisong sebuah desa atau Lembang (sebutan desa yang ada di Kabupaten Tana Toraja) yang ada di Kecamatan Makale melakukan kemitraan penelitian dengan program pengembangan digital inklusi oleh pemerintah desa untuk menghadirkan layanan informasi dan administrasi warga desa dalam menagntisipasi minimnya infromasi dan sulitnya akses jalan yang menhgubungkan antara dusun yang memiliki jarak beberapa kilometer. Upaya layanan digital bertujuan memudahkan Masyarakat untu mendapatkan layanan, serta berpartisipasi dalam proses Pembangunan. Setiap saat pemerintah Lembang dapat terbubung dengan warganya dan pemenuhan hal wagra pun dapat direalisasikan.

METODE (METHODS)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development. Metode penelitian yang mengedepankan partisipasi mitra, penelitian ilmiah dilakukan dengan tujuan menginformasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut (Koningstein & Azadegan, 2021). Penelitian yang bertujuan untuk menyadarkan sistem informasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

masyarakat tentang penekanan pada inklusi digital sebagai solusi ke bingkai masalah kesenjangan digital Penggunaan Internet sebagai hal yang diinginkan dalam masyarakat progresif tetapi memberi label non-penggunaan sebagai masalah atau problematik yang perlu diperbaiki. Melalui penelitian ini, kami berpendapat, bahwa kesenjangan digital menciptakan ketidaksetaraan baru sehingga perlu pemanfaatan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Faktor-faktor Kesenjangan Digital dan dampaknya pada Marginalisasi informasi dan layanan administrasi

Perjalanan studi kajian dan program pengembangan digitalisasi lembang, terlebih dahulu dikaji tentang kesenjangan digital yang dapat memicu terjadinya kelompok Masyarakat marginal karena keterbatasan informasi pada pemerintahan Desa/Lembang Bo'ne Buntu Sisong karena berada di daerah terpencil atau memiliki topografi yang sulit dijangkau. Salah satu lembang pemerintahan kecamatan Makale Selatan dengan ketinggian 1400 MDPL, berjarak 30 Kilometer dari kota Makale. Lembang dengan luas wilayah 9.280 ha. Jumlah penduduk 2.360 Jiwa tersebar dalam empat dusun meliputi dusun Tondok Lemo 464 jiwa, To'limbong 731 jiwa, Tekko 319 jiwa, dan dusun Bo'ne 846 jiwa. Kondisi jarak anatar dusun yang jauh dengan kondisi jalan tanah yang menghubungkan desa dan dusun menyulitkan Masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan yang cepat dan mudah. Atas kondisi tersebut pemerintahan desa/lembang menyetujui dengan diadakannya program layanan berbasis digital melalui pengembangan website dengan harapan dapat menjangkau seluruh wilayah lembang dalam penyampaian informasi dan pelayanan administrasi tanpa harus mendatangi kantor lembang. Tahap awal dengan melakukan kajian melalui diskusi kelompok terkait kondisi asset digital yang dimiliki. Berdasarkan hasil diskusi tersebut ditemukan beberapa kesenjangan digital yang sedang dihadapi oleh pemerintah meliputi: kesenjangan infrastruktur, kesenjangan skill atau keterampilan digital aparatur lembang, alokasi anggaran yang belum tersedia, kurangnya pengetahuan tentang manfaat sistem informasi digital, belum terdapat kemitraan dengan lembaga lain dalam membangun sistem digital.

Kesenjangan infrastruktur diakibatkan oleh akses terbatas terhadap infrastruktur teknologi seperti kurangnya personal computer terkoneksi jaringan dengan kapasitas yang memadai. Sedangkan akses jaringan internet pada semua wilayah desa sudah bisa mengakses jaringan internet meliputi empat dusun yang ada. Pemerintahan lembang sendiri memanfaatkan kondisi tersebut untuk memudahkan berkoordinasi dengan para kepala dusun setiap saat. Kondisi ini memudahkan kepala lembang dan kepala dusun dalam berinteraksi dalam menjalankan pemerintahan.

Kesenjangan digital juga disebabkan kurangnya keterampilan digital yang dimiliki oleh kepala lembang dan aparatnya. Sumber daya manusia pada pemerintahan lembang dengan keterampilan digital yang cukup menggunakan teknologi digital menjadi salah satu jenis kesenjangan yang dihadapi. Kepala lembang dan aparatnya menggunakan media digital seperti handphone dan komputer terkoneksi jaringan untuk kegiatan administrasi seperti pengetikan surat dan pembuatan perencanaan anggaran serta laporan pertanggungjawaban keuangan lembang.



Kesenjangan lainnya oleh faktor tidak tersedianya anggaran yang mendukung program pengembangan sistem digital. Dana yang dialokasikan pada pengembangan website belum tersedia pada tahun anggaran 2023. Sehingga inisiatif kepala lembang untuk melakukan rapat revisi anggaran bersama aparat lembang, Dewan permusyawaratan Lebang, dan kepala-kepala dusun. Ketidakterseediaan anggaran karena sebelumnya pemerintah lembang belum sepenuhnya menyadari manfaat dari mengadopsi teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi administratif, memberikan layanan publik, dan mempromosikan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi beberapa kesenjangan tersebut maka pemerintah lembang bersama tim penelitian menjalin kemitraan dalam mendukung pengembangan digitalisasi lembang dengan program website.

Menjembatani kesenjangan digital melalui digital inklusi digital oleh pemerintah desa melalui pengembangan website desa

Siapa pun tidak bisa menutup diri dari arus global. Pembuat kebijakan diperhadapkan pada peluang sekaligus tuntutan peningkatan nilai dan produktifitas untuk selaras dengan digitalisasi. Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan (James Manika, Susan Lund, Jacques Bughin, Jonathan Woetzel, Kalin Stamenov, 2016b): (1) Berpikir secara strategis tentang peran yang dapat dimainkan oleh negara dalam hal ini pemerintah yang menjalankan pelayanan setara. Pembuat kebijakan harus hati-hati mempertimbangkan bagaimana membangun keunggulan komparatif dan inovatif. (2) pemerintah seharusnya lebih dapat mengatasi hambatan akses informasi dan administrasi yang menghambat kesejahteraan masyarakat. (3) Mengatasi dislokasi dimana arus global dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan perpindahan dalam jangka pendek. Pemerintah harus mempertimbangkan *trade-off* ini dan terbuka untuk arus global pada kecepatan ekonomi mereka dan masyarakat. Para warga membutuhkan jalan yang lebih jelas menuju peran baru dan biaya sosial mengabaikan masalah ini tumbuh dari waktu ke waktu. Ini akan membutuhkan respons yang jauh lebih proaktif memastikan bahwa pasar tenaga kerja dan sistem pelatihan dapat menghadapi perubahan yang cepat. (4) Berinvestasi dalam sumber daya manusia Dimana sistem digital mempromosikan inklusivitas, dan hal ini hanya akan tercapai apabila didukung oleh pengembangan menyediakan kelancaran bahasa, literasi digital dasar, dan lainnya dalam meningkatkan keterampilan digital sehingga individu dapat memanfaatkan peluang transformasi tersebut. Model pengembangan sistem digital di pedesaan menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi kondisi Masyarakat agar tidak terisolate dari kemajuan global serta tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara yang berkeadilan.

Pengembangan website desa/Lembang Bo'ne Buntu Sisong memiliki sejumlah manfaat signifikan sesuai dengan solusi atas masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan Masyarakat Lebang. Hal ini pun sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Makmur, 2019), meskipun membutuhkan waktu untuk meningkatkan dan mampu mengoperasikan maupun menguasai dalam transformasi pelayanan pemerintahan lembang berbasis digital atau *e-government*. Transformasi digital merupakan istilah yang digunakan dalam akademik untuk menyebut perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh teknologi digital dan transformasi digital terjadi karena adanya perubahan yang didorong oleh perkembangan teknologi pada



organisasi dan lingkungan (Widnyani et al., 2021). Transformasi digital harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami teknologi yang akan digunakan (Ananda, 2021). Transformasi digital merupakan konsekuensi di era disrupsi atau lebih dikenal sebagai Era Industri 4.0, sehingga terjadi perubahan model bisnis, merombak ekosistem bisnis yang ada menjadi ekosistem baru yang lebih inovatif, kompleks dan dinamis (Winasis, 2020). Transformasi digital mencakup penggunaan dan kemampuan transformatif dalam hal menginformasikan kesadaran digital. Tahap transformasi adalah tahap penggunaan proses digital yang memungkinkan inovasi dan kreativitas dalam suatu produk digital tertentu, bukan hanya meningkatkan saja, tetapi juga mendukung metode tradisional. (Rahmawati et al., 2021).

Transformasi layanan ke sistem digital melalui pendirian website Lembang dengan alamat <https://bonebuntusisong.desa.id/> yang merupakan domain resmi dari kementerian komunikasi dan Informasi. Pendirian website sebagai langkah solutif bagi permasalahan yang dihadapi Masyarakat lembang tentang marginalisasi informasi dan layanan administrasi yang dialami karena kendala jarak tempuh dengan kondisi jalan yang sulit diakses.

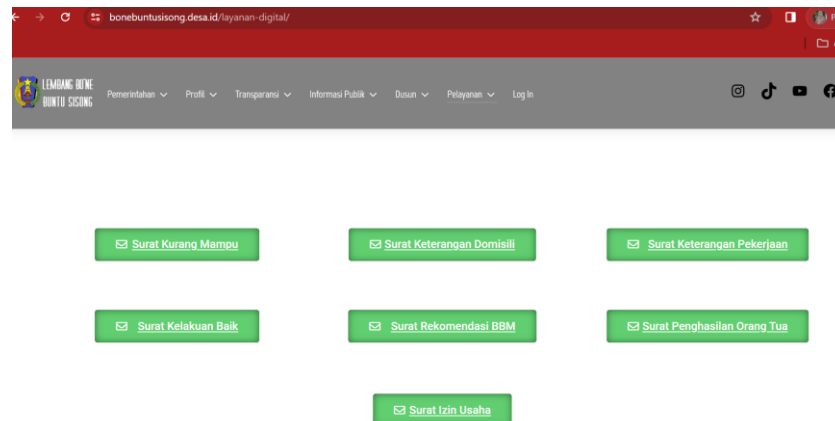


Gambar 1: Laman resmi website Bo'ne Buntu Sisong

Dikembangkannya layanan informasi dan administrasi oleh Lembang Bo'ne Buntu Sisong penting oleh karena berbagai asumsi antara lain (1) memudahkan warga Lembang dalam mengakses Informasi karena menyediakan platform sentral untuk menyimpan dan menyajikan informasi terkait pemerintahan, program-program Lembang, berita, acara, dan layanan administrasi. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi ini tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah; (2) Peningkatan transparansi anggaran pendapatan dan belanja Lembang Bo'ne Buntu Sisong, sebab website menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga dapat menciptakan kepercayaan di antara warga terhadap pemerintahan lembang; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat warga Lembang dalam memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, atau memberikan saran melalui kolom komentar dan google form survey kepuasan; Digitalisasi sistem Layanan Publik meliputi: surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili, surat keterangan pekerjaan, surat keterangan kelulusan baik,



Surat rekomendasi BBM, surat penghasilan orangtua, dan surat keterangan usaha. Semua layanan tersebut dapat dilakukan secara digital.



Gambar 2: Jenis pelayanan Administrasi warga Lembang

Pengembangan website juga sebagai media inklusi yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani warga, sehingga dapat terhubung dengan dalam melakukan promosi Potensi lembang Bo'ne Buntu Sisong dengan berbagai potensi lokal seperti potensi pariwisata, produk lokal, dan inisiatif ekonomi masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan penyebaran informasi tentang potensi Lembang.

Pengembangan digitalisasi Lembang difokuskan pada pelatihan digital berupa pengelolaan website kepada aparat lembang dan kelompok pemuda warga lembang. Penyelenggaraan ini untuk memberikan keterampilan dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta menggunakan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Gambar 3: warga Lembang mengikuti pelatihan dan sosialisasi Penggunaan Website untuk kebutuhan akses Informasi dan layanan informasi.

Sosialisasi pun diberikan kepada Masyarakat agar memiliki pemahaman pentingnya mengakses informasi, mendapatkan layanan administrasi, serta berpartisipasi dalam memberikan saran masukan pada Pembangunan Lembang melalui website. Kemampuan dalam melakukan akses informasi dan memanfaatkan dalam kemudahan layanan publik agar Masyarakat Lembang dapat berpartisipasi aktif berinteraksi dengan pemerintah melalui sistem digital. Literasi penggunaan media sosial juga didorong media untuk berbagi informasi yang ada diwebsite Lembang. Artinya, pengembangan digital inklusi di pedesaan diharapkan memberikan ruang baru interaksi sebagai solusi terhadap sulitnya mendapatkan layanan karena kondisi topografi dan akses transportasi yang sulit. Meskipun demikian, memerlukan pendekatan holistik dan juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi serta masyarakat untuk sama-sama mengembangkan sistem digitalisasi secara berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan digital Inklusi di Desa

Pengembangan website desa terbukti dapat memberikan impact positif dalam layanan informasi dan administrasi desa. Penelitian sebelumnya oleh Tri Sutrisno dan Dedy Trinawarman (2018) terbukti telah bisa menjadi langkah solusi yang dapat digunakan untuk sarana informasi, komunikasi dan kolaborasi dalam permasalahan pembangunan Desa. Website desa juga dapat digunakan sebagai sarana promosi yang dapat mendukung tujuan pembangunan desa (Sutrisno & Trisnawarman, 2019). Hal inipun dirasakan manfaatnya oleh warga Masyarakat Lembang Bo'ne Buntu Sisong. Salah satu warga Lembang yang menuntut ilmu di Makassar mengungkapkan bahwa hadirnya website dapat memudahkan pengurusan surat keterangan seperti surat keterangan tidak mampu, surat keterangan penghasilan orang tua yang dapat dilakukan secara online, dan tidak perlu lagi pulang kampung hanya untuk sekedar mengurus administrasi yang akan memakan waktu dan biaya perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan digitalisasi layanan berbasis website dapat memenuhi hak warga secara efektif dan efisien.

Sebagaimana dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 82 bahwa (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Hadirnya website Lembang menjadi alternatif pelaksanaan transparansi pemerintahan menampilkan informasi pemerintah setempat, kebijakan, dan keputusan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi Masyarakat sebagaimana amanah undang-undang pada pasal tersebut. Artinya, dapat menjadi ruang baru



partisipasi warga agar tidak termarginalkan dari proses pengambilan Keputusan pemerintahan, dengan demikian kebutuhan mereka dapat disuarakan dalam proses perencanaan anggaran, dapat pula memberikan kontrol secara berkala terhadap realisasi anggaran yang dilaksanakan pemerintahan lembang.

Tantangan kepemimpinan merupakan salah satu faktor bagaimana menghadirkan dukungan kebijakan dan regulasi implementasi digitalisasi atau *e-governmrnt*. Pengetahuan dan kesadaran pemerintahan lembang belum sepenuhnya menyadari pentingnya inovasi tersebut untuk Masyarakat, sehingga butuh proses internalisasi penanaman, pengetahuan, sikap untuk sampai pada tindakan. Proses difusi secara bertahap dalam penyamaan persepsi untuk menghadirkan kesamaan persepsi dalam pengembangan sistem digitalisasai oelh Pemerintahan Lembang

Tantangan budaya warga Lembang dalam menerima transformasi akses informasi dan pelayanan dari analog ke digital. Meskipun sosialisasi dan panduan teknis telah diberikan namun masih terdapat Masyarakat yang menganggap sulit dan senang menggunakan layanan manual dimana semua administrasi dikerjakan oleh aparat Lembang. Hadirnya website belum dimanfaatkan secara partisipastif dan memunculkan kesadaran pemanfataannya. Tantangan lainnya adalah tata kelola berkelanjutan setelah program selesai.

Beberapa tantangan tersebut oleh Lembang Bo'ne Buntu Sisong masih perlu dilakukan aksi tindak lanjut meliputi:

1. Peningkatan keterampilan bagi aparat lembang untuk mengelola dan memanfaatkan sistem *e-government* pada website Lembang seperti membuat dan mempublish berita kegiatan pemerintah dan warga Lembang, memperbaharui konten statis seperti palaporan anggaran yang didisain dalam bentuk flyer. Program pun pelatihan intensif tetap harus dilakukan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan aparat demikian pula halnya dengan warga masyarakat.

Rendahnya Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan informasi dan administrasi. Terkadang masih terdapat warga yang rela menempuh perjalanan jauh untuk mengurus surat keterangan domisili di kantor lembang. Dengan demikian, tantangan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pemanfaatan layanan e-Government melalui kegiatan literasi untuk pendidikan dan penyadaran masyarakat, agar memanfaatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya merupakan transformasi tindakan yang meski terus dibangun.

SIMPULAN (CONCLUSION)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital yang disebabkan oleh faktor keterbatasan infrastruktur, keterampilan akses, dan ketidaktersediaan anggaran yang menyulitkan pemerintah dalam penegakan digitalisasi sesuai dengan undang undang nomor 6 tahun 2014. Kesenjangan tersebut rentan menghasilkan marginalisasi kelompok masyarakat dalam era digital yakni kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi dan layanan



digital khususnya kelompok masyarakat pedesaan yang disulitkan dengan kondisi alam dan letak domisili yang berada pada daerah terpencil. Pengembangan digital inklusi oleh pemerintahan lembang Bo'ne Buntu Sisong menjadi sebuah solusi mengantisipasi kondisi marginalisasi informasi dengan membangun website desa/lembang yang secara efektif dan efisien dapat memenuhi hak masyarakat terhadap informasi dan layanan publik yang efektif dan efisien. Beberapa tantangan dihadapi dalam pengembangan digitalisasi pemerintah lembang atau e-government meliputi: meliputi (1) tantangan kepemimpinan yang menghadirkan dukungan kebijakan dan regulasi implementasi e-governmet; (2) tantangan budaya warga desa dalam menerima transformasi akses informasi dan pelayanan dari analog ke digital, Dimana ketersediaan akses belum dimanfaatkan secara partisipatif dan memunculkan kesadaran pemanfaatannya; (3) tantangan tata Kelola dimana transformasi layanan informasi dan administrasi dalam sistem e-governmet meliputi tata kelola infrastruktur TIK dan dukungan kompetensi aparatur pemerintah desa. Manfaat penelitian diharapkan memberikan kajian penerapan implementasi digital inklusi untuk meminimalisir terjadinya kelompok marginal akibat kesenjangan digital.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Amarini, I. (2018). Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2340>
- Ananda, I. (2021). LITERATUR REVIEW: IMPLEMENTASI STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PADA ORGANISASI INTERNASIONAL. *Computer Based Information System Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.33884/cbis.v9i1.2473>
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Díaz Andrade, A., & Techatassanasoontorn, A. A. (2021). Digital enforcement: Rethinking the pursuit of a digitally-enabled society. *Information Systems Journal*, 31(1), 184–197. <https://doi.org/10.1111/isj.12306>
- Evi Novianti. (2019). *Teori Komunikasi Umum Dan Aplikasinya*. ANDI.
- Fahyuni, E. F. (2017). Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi (Prinsip Dan Aplikasi Dalam Studi Pemikiran Islam). In *Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi (Prinsip Dan Aplikasi Dalam Studi Pemikiran Islam)*. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-60-7>
- James Manika, Susan Lund, Jacques Bughin, Jonathan Woetzel, Kalin Stamenov, D. D. (2016a). *Digital Globalization: The New Era Of Global Flows*. McKinsey Global Institut.
- James Manika, Susan Lund, Jacques Bughin, Jonathan Woetzel, Kalin Stamenov, D. D.



- (2016b). *Digital Globalization: The New Era Of Global Flows*. McKinsey Global Institut.
- Kharisma, R. A. M., & Zulfiningrum, R. (2020). REPRESENTASI CYBER SOCIETY DALAM FILM “SEARCHING.” *Jurnal Audience*, 3(2). <https://doi.org/10.33633/ja.v3i2.4066>
- Khusna, I. H. (2019). Strategi Pemberdayaan Desa Melalui Pemanfaatan Tik Di Kabupaten Pemalang Village Development Strategy By Utilization of Ict in Pemalang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(2), 78–89.
- Koningstein, M., & Azadegan, S. (2021). Participatory video for two-way communication in research for development. *Action Research*, 19(2), 218–236. <https://doi.org/10.1177/1476750318762032>
- Littlejohn, S. W., & Karen A. Fos (Eds.). (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. Sage Publications, Inc.
- Meisyaroh, S. (2014). Instant Messaging Dalam Perspektif Ekologi Media Dan Komunikasi. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 8(1), 118–130. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/semiotika/article/view/961>
- Prayoga, J., Elyas, A. H., Hasugian, B. S., & Luthfi, M. (2020). Pelatihan Dan Sosialisasi Website Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Guna Mempermudah Memberikan Informasi Kepada Masyarakat. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 47–51. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i1.538>
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Setiawan, A. B., & Sulaksono, J. (2019). SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL ISHLAH KOTA KEDIRI. *Network Engineering Research Operation*, 4(2). <https://doi.org/10.21107/nero.v4i2.122>
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1). <https://doi.org/10.31289/simbolika.v4i1.1474>
- Setifani, N. A., Rolliawati, D., & Wahyudi, N. (2022). Analisis Pengaruh Digital Divide Terhadap User Satisfaction dan Individual Performance pada Pengguna Sistem Informasi Akademik. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.21456/vol12iss1pp45-56>
- Suryani, F. Z., & Hermawan, N. D. N. (2021). Marginalisasi Ojek Pangkalan dalam Iklan Grab Versi #PilihAman. *Jurnal Audiens*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jas.v2i1.8954>
- Sutedi, A., Septiana, Y., & Abdul Halim, R. (2021). Sistem Informasi Akademik Santri Berbasis Web di Pondok Pesantren. *Jurnal Algoritma*, 18(1).



<https://doi.org/10.33364/algorithm/v.18-1.934>

Sutrisno, T., & Trisnawarman, D. (2019). Pembuatan Dan Implementasi Website Desa Pandowoharjo. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(2), 211–220. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i2.2905>

Triguswinri, K., & Afrizal, T. (2021). Eksklusi Sosial dalam Kapital Digital dan Kebijakan Virtual (Studi Filantropi Platform KitaBisa.com). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 303. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.394>

Vassilakopoulou, P., & Hustad, E. (2023). Bridging Digital Divides: a Literature Review and Research Agenda for Information Systems Research. *Information Systems Frontiers*, 25(3), 955–969. <https://doi.org/10.1007/s10796-020-10096-3>

Widnyani, N. M., Astitiani, N. L. P. S., & Putri, B. C. L. (2021). PENERAPAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA UKM SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.38043/jimb.v6i1.3093>

Winasis, S. (2020). Transformasi Digital di Industri Perbankan Indonesia : Impak pada Stress Kerja Karyawan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(1), 55–64. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.3162>

